

PERKEMBANGAN TERKINI PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)

dr. Untung Suseno Sutarjo, M.Kes
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

JAKARTA, 20 FEBRUARI 2018

OUTLINE

1. **PENDAHULUAN**
2. **CAPAIAN PELAKSANAAN JKN**
3. **PERMASALAHAN DAN TANTANGAN**
4. **UPAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN**

Roadmap JKN

3

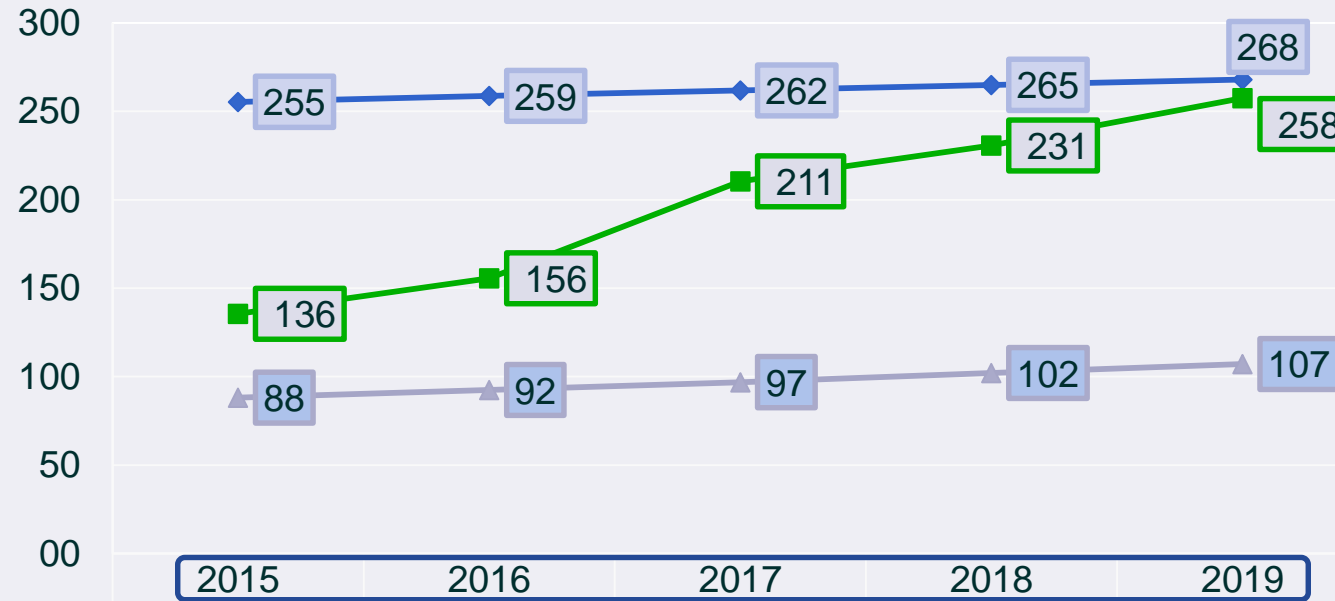


No.	Aspek	2014	2019
1.	Kepesertaan	121,6 juta peserta dikelola BPJS Kesehatan	257,5 juta peserta (semua penduduk dikelola BPJS Kesehatan)
2.	Manfaat dan luran	<ul style="list-style-type: none"> Manfaat komprehensif sesuai indikasi medis. luran: Kelas I : Rp. 80.000 Kelas II : Rp. 51.000 Kelas III : Rp. 25.500 	Manfaat sama untuk semua penduduk
3.	Pelayanan Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> Perluasan dan pengembangan faskes dan nakes secara komprehensif Evaluasi dan penetapan pembayaran 	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah mencukupi Distribusi merata Sistem rujukan berfungsi optimal Pembayaran secara prospektif dan harga keekonomian untuk seluruh penduduk.

Peta Jalan Menuju *Universal Health Coverage (UHC)*

Proyeksi Jumlah Penduduk, Target Peserta JKN & PBI-KIS 2015-2019

Tahun	%-Peserta JKN
2015	60%
2016	70%
2017	80%
2018	90%
2019	95%

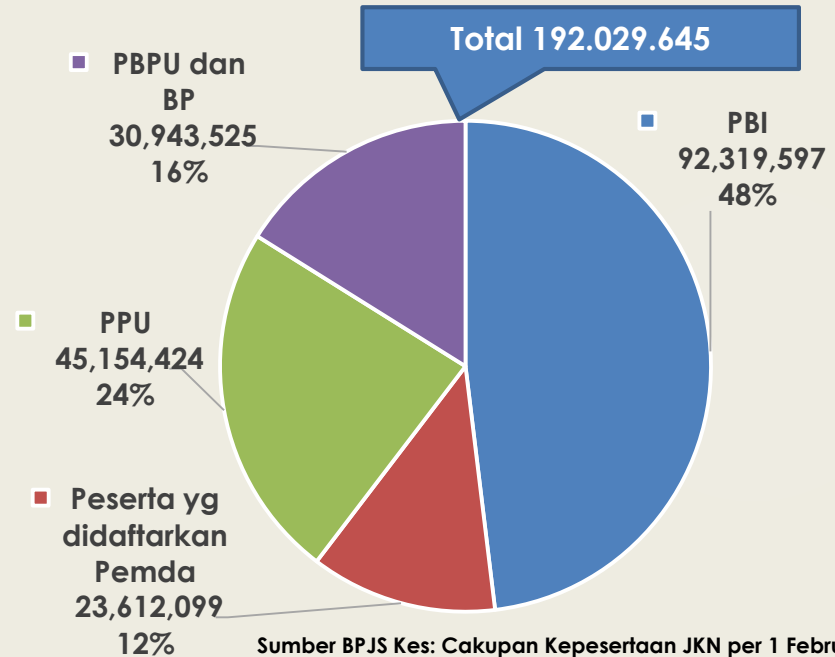
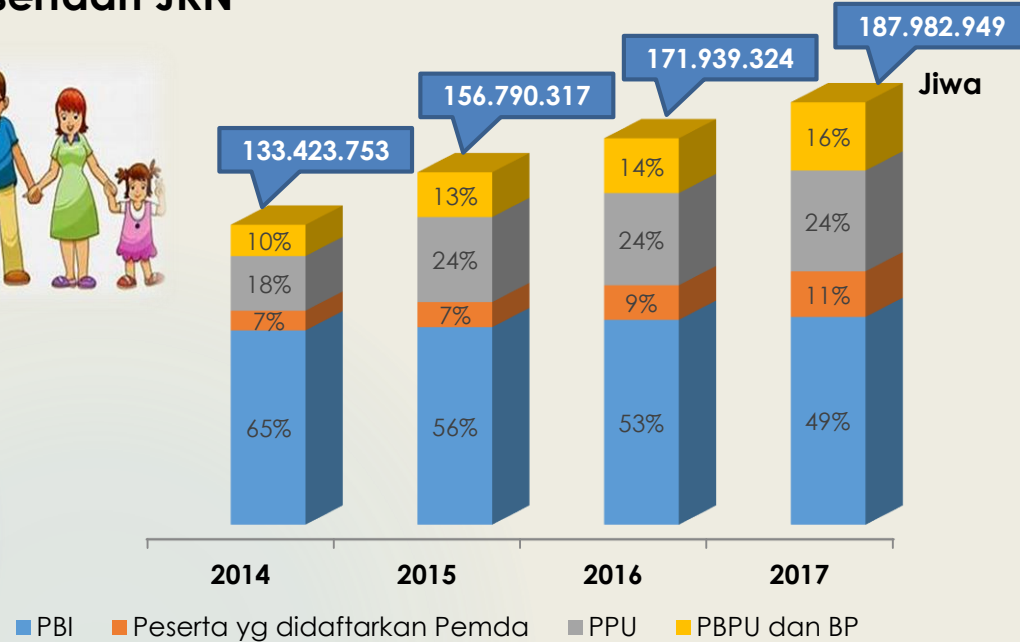


	2015	2016	2017	2018	2019
◆ Penduduk (Jiwa)	255	259	262	265	268
■ Peserta JKN (Jiwa)	136	156	211	231	258
▲ PBI-KIS (Jiwa)	88	92	97	102	107

Capaian Kepesertaan JKN (Jiwa)	156.790.317	171.939.324	187.982.949
Capaian Kepesertaan PBI (Jiwa)	87.882.867	91.125.019	92.380.352

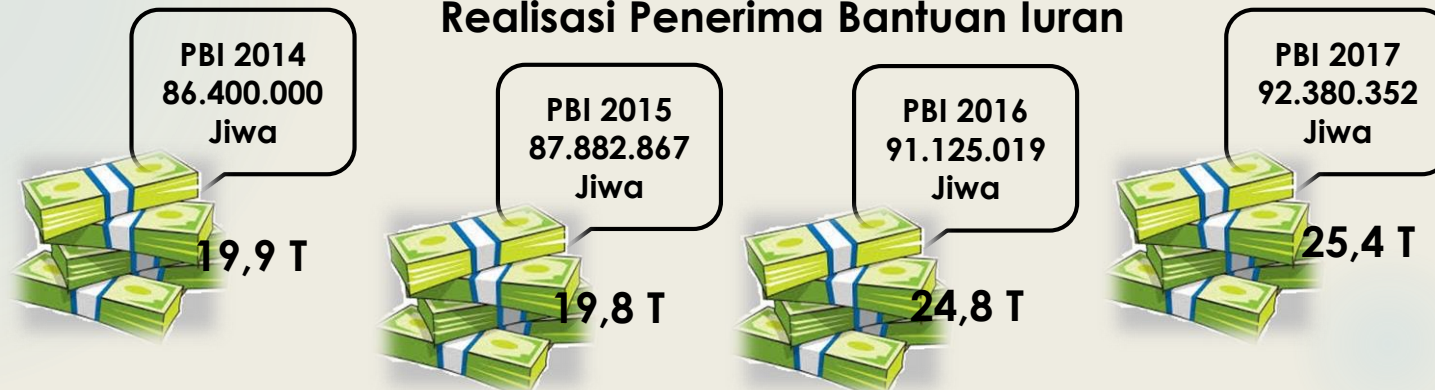
Capaian Pelaksanaan JKN

Kepesertaan JKN



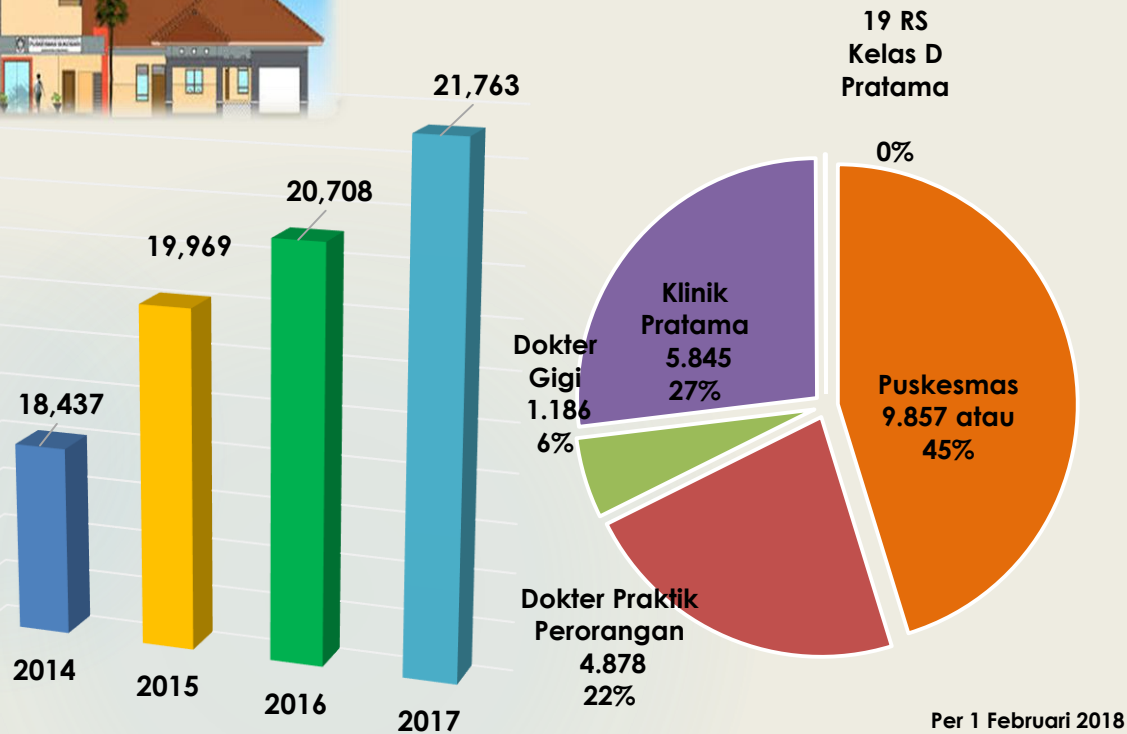
Sumber BPJS Kes: Cakupan Kepesertaan JKN per 1 Februari 2018

Realisasi Penerima Bantuan Iuran

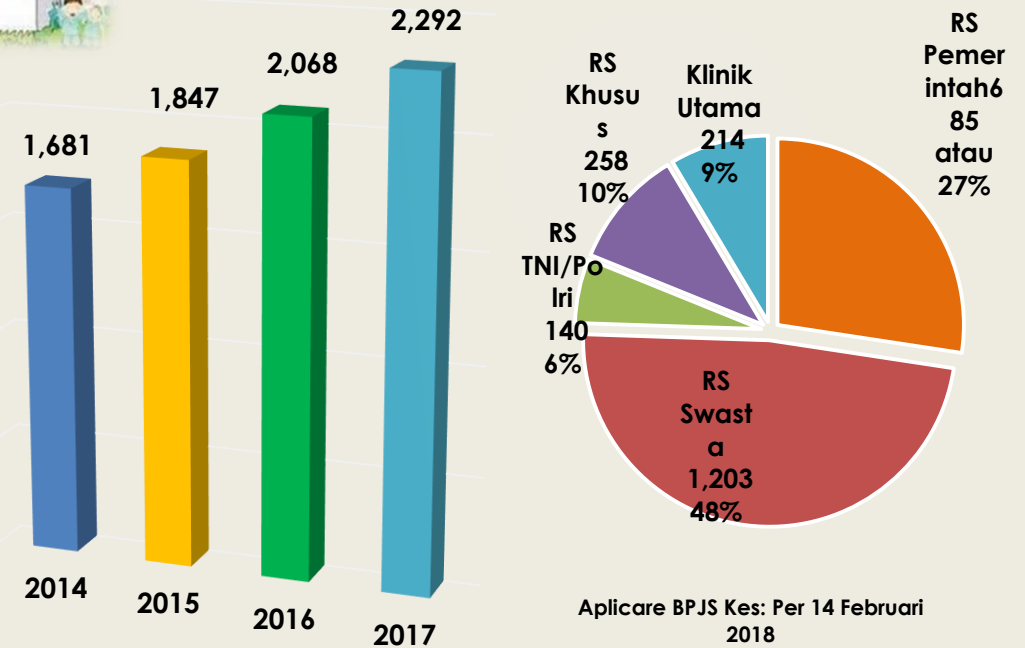


Capaian Pelaksanaan JKN

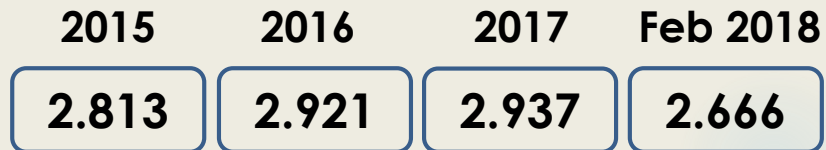
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama



Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut



Fasilitas Apotik dan Optikal



Capaian Pelaksanaan JKN

Kondisi Integrasi Jamkesda ke dalam Program JKN

No	Keterangan	Jumlah
1.	Kab/Kota yang sudah integrasi	482
2.	Kab/Kota yang memiliki Jamkesda dan belum integrasi	6
3.	Kab/kota yang tidak memiliki Jamkesda	26
Jumlah		514

6 Kab/Kota yang mempunyai Jamkesda tapi belum Integrasi

NO.	PROVINSI	KAB/KOTA
1.	MALUKU	KOTA AMBON
2.		MALUKU TENGGARA
3.		SERAM BAGIAN BARAT
4.	NTT	ENDE
5.		NGADA
6.	PAPUA BARAT	PEGUNUNGAN ARFAK

26 Kab/Kota yang tidak mempunyai Jamkesda

NO.	PROVINSI	KAB/KOTA	NO.	PROVINSI	KAB/KOTA
1.	SUMSEL	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	15.	PAPUA	PANIAI
2.		MUARA ENIM	16.		WAROPEN
3.		KOTA PRABUMULIH	17.		DOGIYAI
4.		MUSI RAWAS UTARA	18.		INTAN JAYA
5.	BABEL	BANGKA BARAT	19.		SUPIORI
6.	NTT	MALAKA	20.		DEIYAI
7.	PAPUA	KOTA JAYAPURA	21.		ASMAT
8.		JAYAPURA	22.		JAYAWIJAYA
9.		MAMBERAMO RAYA	23.		YAHUKIMO
10.		SARMI	24.		TOLIKARA
11.		PUNCAK JAYA	25.		MAMBERAMO TENGAH
12.		PEGUNUNGAN BINTANG	26.		YALIMO
13.		PUNCAK			
14.		KEPULAUAN YAPEN			

Capaian Pelaksanaan JKN

Pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional

	2014 (Laporan Audited Des)	2015 (Laporan Audited Des)	2016 (Laporan Non Audited Des)	2017 (Laporan Bulanan BPJS Sampai dengan Bulan Desember)
Pemanfaatan di FKTP (Puskesmas, Dokter Praktek Perorangan/ Klinik Pratama)	66,8 juta	100,6 juta	134,9 juta	146,5 juta
Pemanfaatan di Poliklinik Rawat jalan RS	21,3 juta	39,8 Juta	50,4 Juta	64,43 juta
Pemanfaatan Rawat Inap RS	4,2 juta	6,3 juta	7,6 Juta	8,72 juta
Total Pemanfaatan	92,3 juta	146,7 Juta	192,9 Juta	219.6 juta

Tantangan Kepesertaan PBI JKN

1. Dalam Database Kepesertaan PBI JKN Masih Ada Peserta Yang Belum Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) → saat ini kurang lebih 20 juta peserta PBI belum memiliki NIK
2. Masih Terdapat Data Ganda (Satu Peserta Memiliki Lebih Dari Satu Nomor Kepesertaan)
3. Masih Ada Sasaran PBI Yang Belum Mengetahui Telah Terdaftar Sebagai Peserta JKN (Belum Menerima KIS)
4. Distribusi KIS Belum Optimal
5. Verifikasi Dan Validasi Data Kepesertaan PBI JKN Belum Optimal
6. Utilisasi Peserta PBI –JKN Masih Rendah

Upaya

9

1. Adanya akses data NIK dari Dukcapil Kemendagri kepada Kemensos dan BPJS Kesehatan
2. Penonaktifan data ganda dalam kepesertaan PBI oleh Kemensos berdasarkan rekomendasi Dinsos Kab./Kota
3. Redistribusi KIS
4. Verifikasi dan Validasi data KIS menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kemensos dan proses verifikasi dan validasi dilakukan tiap bulan dengan tepat waktu
5. Pertemuan rutin koordinasi pemutakhiran data PBI antara Kemenkes, BPJS Kesehatan, dan Kemensos.

Tantangan Pelayanan JKN-KIS

1. Distribusi dan Kompetensi Tenaga Kesehatan
2. Pemenuhan dan Distribusi Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan
3. Ketersediaan dan Distribusi Obat
4. Optimalisasi Sistem Rujukan
5. Peningkatan Peran Swasta dan Pemerintah dalam Pemenuhan Supply Side Program JKN

Upaya

10

1. Dukungan pendanaan melalui DAK dan optimalisasi peran Pemda dalam Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alkes.
2. Nusantara Sehat, Penugasan Khusus dan Wajib Kerja Dokter Spesialis dalam rangka optimalisasi distribusi dan kompetensi Tenaga Kesehatan
3. Optimalisasi Sistem Rujukan berdasarkan kompetensi, regionalisasi Sistem Rujukan, dan Implementasi Telemedicine.
4. Mendorong Fasilitas Kesehatan untuk mengisi Rencana Kebutuhan Obat
5. Pemberian Akses pada Pihak Swasta ke E-Purchasing Obat dan Alkes
6. Optimalisasi peran Pemerintah Daerah/ Dinas Kesehatan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan kesehatan
7. Skema Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS) yang berorientasi infrastruktur, pelayanan, informasi, advokasi kesehatan, serta peningkatan kapasitas.

Tantangan Pembiayaan JKN-KIS

Upaya

11

1. Kasus Pending Klaim Di FKRTL
2. “Ketidakcukupan” Tarif Kapitasi
3. “Ketidakcukupan” Tarif INA-CBG
4. Potensi Fraud Dalam JKN
5. Defisit Dana Jaminan Sosial (DJS)

1. Pertemuan Rutin koordinasi Penyelesaian Pending Klaim oleh Kemenkes dan BPJS Kesehatan
2. Penyusunan Manual Coding
3. Re- Klasifikasi Sistem INA-CBG
4. Updating Tarif INA-CBG dan Kapitasi
5. Penyusunan Pedoman Pencegahan, Deteksi dan Penanganan Kecurangan sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Bersama Pembentukan Tim Bersama Penanganan Kecurangan
6. Revisi Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan yang saat ini sedang proses pembahasan antar Kementerian.
7. Redistribusi peserta di FKTP
8. Pembobotan variable independent untuk Pedesaan dan Perkotaan

TERIMA KASIH